

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepariwisataan akhir-akhir ini sering menjadi pokok pembicaraan yang hangat di berbagai media massa, diskusi atau seminar terutama perkembangan pariwisata di daerah yang memiliki asset wisata yang beraneka ragam, terutama wisata alam budaya yang indah, bukit-bukit dengan panorama yang permai, adat istiadat beraneka ragam, serta flora dan fauna yang khas dan langka. " Inilah yang menyebabkan pola perjalanan wisata dirancang sampai ke daerah atau Desa yang terkecil. " ¹

Peningkatan kepariwisataan ini dibutuhkan manusia yang memiliki Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta pembinaan dari pemerintah supaya masyarakat mengupayakan dalam meningkatkan devisa negara, karena manusia adalah sebagai pemeran utama dalam mengembangkan dan mengendalikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi., sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin.

Menurut B.J. Habibie bahwa dalam melaksanakan teknologi, perlu adanya pengendalian dan pemanfaatan teknologi yang dikendalikan oleh sumberdaya manusia yang merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam menentukan berhasil tidaknya ilmu pengetahuan

¹ Syamsidar, *Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Pariwisata*, Yogyakarta 1999, hal 53.

uang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara efisien dan produktif untuk meningkatkan taraf hidup manusia.”²

Kesadaran manusia akan pentingnya mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu pemasukan devisa bagi pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini didukung oleh pendapat Oka. A. Yoeti, yang menyatakan bahwa pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu pemasukan devisa bagi pemerintah yang cukup besar. Sebelum Tahun 1980-an pemerintah Indonesia telah melihat potensi 13,677 Pulau yang ada dan ratusan variasi adat kebudayaan yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri.

Kemudian pemerintah melahirkan beberapa keputusan penting dibidang pariwisata. Seperti terbentuknya Yayasan Tourist Indonesia (1955), Dewan Tourime Indonesia (1957), dan Lembaga-lembaga pariwisata Nasional (1980) yang pada dasarnya semua lembaga tersebut bertugas mengenai masalah kepariwisataan nasional. Kebijakan pemerintah dibidang ini semakin memiliki arah yang jelas. Apa lagi kemudian dikeluarkan Keppres No. 30 Tahun 1969 tentang pengembangan kepariwisataan nasional sebagai salah satu sumber devisa negara.³

Penjabaran lebih lanjut dari Keppres No. 30 tersebut adalah keluarnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969, dimana dalam Pasal 2 di cantumkan, bahwa pengembangan kepariwisataan digerakkan dengan tujuan meningkatkan devisa pada khususnya dan memberi kesempatan kerja sektor pariwisata serta memperkenalkan budaya-budaya yang ada dan mendaya gunakan keindahan alam Indonesia, di samping meningkatkan persaudaraan dan persahabatan Internasional

² Ibid, hal. 23.

³ Oka. A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Aksara, Bandung 1983, hal. 3